

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Tahun 2025 memiliki focus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di Tahun 2025 berdasarkan masing-masing indicator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan. Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2025 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, maupun yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2025. Pengukuran target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan. Berikut capaian sasaran kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Capaian Sasaran Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Selatan	- Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	- Indeks Desa Membangun	0,6850%	0,6680%	0,6680%
		- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan	- Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (LPM Desa)	97%	95%	95%
		- Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	- Persentase Kader PKK Aktif	40%	20%	20%
		- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal	- Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Sumsel	179 DT 0 DST	179 DT 0 DST	179 DT 0 DST
			- Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	96%	90%	90%

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Selatan	- Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	- Indeks Desa Membangun	0,65 %	0,63 %	0,63 %	0,6850%	0,6680%	0,6680%
		- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/ kelurahan	- Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (LPM Desa)	95%	92%	92%	97%	95%	95%
		- Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	- Persentase Kader PKK Aktif	20%	10%	10%	40%	20%	20%
		- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal	- Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Sumsel	159 DT 7 DST	159 DT 7 DST	159 DT 7 DST	179 DT 0 DST	179 DT 0 DST	179 DT 0 DST
			- Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	90%	85%	85%	96 %	90 %	90 %

KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024	2025	Tingkat Kemajuan
				CAPAIAN	CAPAIAN	
1	Terwujudnya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Selatan	- Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	- Indeks Desa Membangun	0,63 %	0,6680%	0,3 %
		- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan	- Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (LPM Desa)	92%	95%	3%
		- Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	- Persentase Kader PKK Aktif	10%	20%	10%
		- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal	- Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Sumsel	159 DT 7 DST	179 DT 0 DST	20 DT DAN 0 DST
			- Persetase Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	85%	90%	5%

ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN DAN SOLUSI

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2025		Analisi keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dikeluarkan
				REALISASI	CAPAIAN		
1	Terwujudnya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui Pemberdayaaan Masyarakat di Sumatera Selatan	- Meningkatkan Lembaga Masyarakatyang diberdayakan - Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalammembangun Desa/kelurahan - Meningkatkan Pemberdayaan KesejahteraanKeluarga - Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal	- Indeks Desa Membangun - Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (LPM Desa) - Persentase Kader PKK Aktif - Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggaldi Sumsel - Persetase Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	0,6680%	0,6680%	BERHASIL	-
				95%	95%	BERHASIL	-
				20%	20%	BERHASIL	-
				179 DT 0 DST	179 DT 0 DST	BERHASIL	-
				90%	90%	BERHASIL	-

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM/KEGIATAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2025	Program/Kegiatan	Menunjang/Tidak
				CAPAIAN		
1	Terwujudnya Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera melalui Pemberdayaaan Masyarakat di Sumatera Selatan	- Meningkatnya Lembaga Masyarakatyang diberdayakan - Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalammembangun Desa/kelurahan - Meningkatnya Pemberdayaan KesejahteraanKeluarga - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal	- Indeks Desa Membangun - Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (LPM Desa) - Persentase Kader PKK Aktif - Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Sumsel - Persetase Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	0,6680% 95% 20% 179 DT 0 DST 90%	Program penunjang urusan pemerintah daerah Program penataan desa Program peningkatan kerja sama desa Program administrasi pemerintahan desa Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	MENUNJANG

Penghargaan/Prestasi yang diterima
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama Penghargaan	Keterangan Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal Diterima
1	Pameran Produk Unggulan dalam rangka Peningkatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah		Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	15 Januari 2026

3.2. Realisasi Anggaran

Disamping capaian kinerja berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, maka untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, pada dokumen laporan kinerja tahun 2025 ini akan dipaparkan capaian kinerja program/kegiatan secara keseluruhan dan berdasarkan penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Capaian Kinerja keseluruhan Program Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar 75.89%. berikut untuk capaian anggaran program/kegiatan secara keseluruhan :

Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan				Target	Pagu	Realisasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (100%)	Rp 13,074,977,131	Rp 9,179,666,146
	A.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun	Rp 230,000,000	Rp 227,448,800
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 85,000,000	Rp 84,259,878
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 40,000,000	Rp 39,429,795
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 30,000,000	Rp 29,346,500
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 75,000,000	Rp 74,412,627
	B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen penganggaran dan keuangan yang tersusun (100%)	Rp 8,086,954,445	Rp 5,520,424,812

		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7,642,717,517	Rp 5,255,736,514
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 327,780,000	Rp 178,260,000
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 63,016,928	Rp 35,166,298
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Jumlah Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 53,440,000	Rp 51,262,000
	C.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan	Rp 50,000,000	Rp 21,000,000
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp 50,000,000	Rp 21,000,000
	D.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian dan Perkantoran	Rp 2,015,332,106	Rp 1,387,541,602
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 60,000,000	Rp 41,745,000
		2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 42,000,000	Rp 36,778,000
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 85,000,000	Rp 80,896,561
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 90,000,000	Rp 61,653,313
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 20,000,000	Rp -

		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 150,000,000	Rp 47,825,000
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1,568,332,106	Rp 1,118,643,728
	E.		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Rp 150,000,000</i>	<i>Rp 149,406,000</i>
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp 150,000,000	Rp 149,406,000
	F.		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Rp 1,749,690,580</i>	<i>Rp 1,446,908,943</i>
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 32,000,000	Rp 10,030,000
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 360,000,000	Rp 321,030,943
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 1,357,690,580	Rp 1,115,848,000
	G.		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Rp 793,000,000</i>	<i>Rp 426,935,989</i>
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Rp 83,000,000	Rp 55,421,500
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 397,000,000	Rp 307,564,489
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 90,000,000	Rp 63,950,000
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 223,000,000	Rp -

II.	PROGRAM PENATAAN DESA			<i>Persentase Fasilitasi Penataan Desa</i>	Rp 100,000,000	Rp 76,264,645
	A.	<i>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</i>		<i>Persentase Penataan Desa yang Terfasilitasi</i>	<i>Rp 100,000,000</i>	<i>Rp 76,264,645</i>
		1	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Rp 100,000,000	Rp 76,264,645
III.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			<i>Persentase Fasilitasi Penataan Desa</i>	Rp 950,000,000	Rp 733,264,349
	A.	<i>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>		<i>Persentase Kerjasama Antar Desa yang Terfasilitasi</i>	<i>Rp 950,000,000</i>	<i>Rp 733,264,349</i>
		1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Jumlah dokumen hasil fasilitas pembangunan kawasan perdesaan (Penilaian BumdesMa terbaik tingkat provinsi sumatera selatan) 2. Jumlah dokumen fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan(fasilitas pelatihan manajemen dan keuangan BumdesMA) 3. Jumlah dokumen hasil fasilitas pembangunan kawasan perdesaan (Inisiasi kerjasama antar desa) 4.jumlah dokumen peningkatan peran pemerintah desa dalam pengembangan sumber daya lokal kawasan perdesaan	Rp 950,000,000	Rp 733,264,349
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			<i>1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya 2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa</i>	Rp 1,196,000,000	Rp 1,126,771,114
	A.	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		<i>Persentase Dokumen hasil pembinaan manajemen pemerintahan desa</i>	<i>Rp 1,196,000,000</i>	<i>Rp 1,126,771,114</i>
		1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp 800,000,000	Rp 754,055,301

		2	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina	Rp 200,000,000	Rp 195,841,459
		3	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa kabupaten/kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis	Rp 181,000,000	Rp 162,779,447
		4	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp 15,000,000	Rp 14,094,907
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			PERSENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)	Rp 4,723,757,951	Rp 4,096,130,152
	A.	<i>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerakdi Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase jumlah dokumen dan lembaga hasil pemberdayaan desa</i>	<i>Rp 4,723,757,951</i>	<i>Rp 4,096,130,152</i>

		1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan(RT, Rw ,PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna (posyandu) 2. Lembaga adat desa/keluraan dan masyarakat hukum adat yg ditibggalkan kapasitas kelembangaanya (KPM desa) 3. Jumlah lembaga kemasyarakat desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, Dan karang taryuna (desa anti korupsi 4. Jumlah Lembaga kemaysarkart desa/keluraan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, Dan karang taruna (pelatian kader pembangunan desa	Rp 400,000,000	Rp 369,010,531
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Jumlah dokumen hasil Fasilitas pengegembangan usaha ekonimi masyrakat dan pemerintan desa dalam meningkatkan pendapatan asil desa 2.Jumlah dokumen hasil fasilitas pengembangan usaha ekonomi mayarkat dan pemerintah desa dalam meningkatkan prndapatan asil desa (pendapatan deerah pontensi desa wisata unggul)	Rp 125,940,951	Rp 125,699,504
		3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah dokumen hasil fasilitas pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tempat guna (nominatur pemenang TTG) 2. Jumlah dokumen hasil fasilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (nominator)	Rp 625,150,000	Rp 513,380,053
		5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	Rp 3,572,667,000	Rp 3,088,040,064

			Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
					Rp 20,044,735,082	Rp 15,212,096,406